

# JEJAK PRAKTIK MILITERISME DALAM PUISI INDONESIA

Yulifin Sungkowati  
Balai Bahasa Surabaya

## Abstract

The existence of military in a country does not automatically mean militarism. However, during the New Order era, militarism was used to dominate political life and became a power shield as an excuse to maintain national stability. Military practice could be seen, among other things in Indonesian literary works, particularly in Wiji Thukul's, Rendra's, Eka Budianta's, and K.H. A. Mustofa Bisri's writing as a reflection of his period. This poems depict military action in the New Order power such as in the land reform case, workers protest, and the 27<sup>th</sup> of July incident. Military action has become a violent pattern to silence these unpleasant incidents. Some critical activists experienced these violent actions such as terror, kidnapping, and torturing.

**Keywords:** militerism, violent, the New Order

## 1. Pengantar

Militer dan militerisme seringkali dianggap sama, meskipun sesungguhnya berbeda. Militer sebagai aparaturnegara diperlukan di setiap negara yang berdaulat untuk menjaga pertahanan teritori dari serangan luar. Kehadiran militer tidak secara otomatis merupakan perwujudan militerisme. Akan tetapi, di berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, militer telah berkembang menjadi militerisme (Heryanto, 2000: 246). Militerisme adalah seperangkat sikap dan praktik sosial yang didasarkan pada anggapan bahwa "peperangan" dengan segala persiapannya adalah sesuatu yang normal dan menggairahkan (Michael Mann dlm. Heryanto, 2000: 249). Militerisme merupakan suatu perilaku yang memandang dunia sebagai suatu medan "peperangan" dengan prinsip paling utama adalah menyerang atau diserang, menguasai atau dikuasai. Budaya militerisme ditandai

oleh rasa takut yang memasyarakat dan menonjolnya simbol kekerasan, kekuasaan, atau kejantanan (Heryanto, 2000: 250). Dengan demikian, militerisme tidak sama dengan pemerintahan yang dipimpin oleh perwira militer, tetapi merupakan sebuah gejala sosial dan kejiwaan yang dapat terjadi di negara yang dipimpin oleh warga sipil sekalipun (Heryanto, 2000: 249). Oleh karena itu, keinginan berbagai elemen masyarakat untuk mengakhiri militerisme di Indonesia tidak berarti memusuhi atau membubarkan kekuatan militer sebagai aparaturnegara (Heryanto, 2000: 246).

Dalam militerisme, badan-badan dan individu militer menyibukkan diri dalam dua hal, yaitu (1) mengurus kehidupan sosial politik, seperti pendidikan, kebudayaan, kesenian, dan (2) dalam menjalankan berbagai kegiatan nonmiliter itu, mereka tidak segan-segan menggunakan cara dan kekuatan militer mulai dari lengan berotot, alat-alat dan teknologi

pembunuh, penyiksaan, penculikan, teror, dan pengerahan massa. Mereka menguasai dinas intelijen, pasukan tempur, dan persenjataan. Akan tetapi, militerisme tidak hanya berarti penguasaan jabatan birokrasi pada badan-badan non-militer, tetapi juga dalam bentuk kebudayaan, norma, angan-angan, cara berpikir, bergaul, dan berbicara yang bercirikan kejantanan, kekerasan, dan sikap kaku mempertentangkan realitas hidup menjadi dua bagian, yakni kawan—lawan atau kalah—menang (Heryanto, 2000: 247).

Rezim Orde Baru yang kebetulan dipimpin oleh seorang mantan perwira tinggi militer telah memosisikan tentara sebagai unsur yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem praktik penyelenggaraan pemerintahan yang "korporatik", militer pada masa Orde Baru menjadi bagian inti kekuasaan (Prasetyo, 2001: 125). Dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, militer mendominasi kehidupan politik (Sulasmono, 1996: 79). Oleh karena itu, militer menjadi kekuatan yang hegemonik yang mendominasi secara sosial (Prasetyo, 2001: 125) dan menempatkan tugas utamanya pada kekuasaan sebagai penyatu struktur, tanpa mempedulikan bagaimana cara struktur itu ditegakkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengabsahan dalam melakukan tindak-tanduk represif, militer menghidupkan kembali tiga wacana utama, yaitu bangkitnya ajaran komunis, Islam fundamentalis, dan kelompok separatis (Prasetyo, 2001: 127).

Jejak praktik militerisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya terdokumentasikan dalam lembaran-lembaran sejarah dan catatan pers, tetapi terefleksikan pula dalam sejumlah karya sastra Indonesia, seperti dalam kumpulan cerpen *Penembak Misterius* (1993) dan *Saksi Mata* (1994) karya Seno Gumira Ajidarma. Dalam ranah puisi, praktik militerisme itu juga tergambar dalam sejumlah karya

penyair, seperti WS. Rendra, Eka Budiarta, Wiji Thukul, dan Mustofa Bisri. Tulisan ini bertujuan memaparkan jejak praktik militerisme Orde Baru dalam karya puisi keempat penyair tersebut.

Karya sastra, tidak terkecuali puisi, tidak lahir dari sebuah ruang vakum. Pada dasarnya, kelahiran karya sastra merupakan kehendak seorang pengarang untuk merespon atau menanggapi sebuah situasi atau keadaan yang sedang atau pernah ditatapnya. Oleh karena itu, munculnya jejak militerisme dalam puisi keempat penyair yang berkarya pada masa Orde Baru itu perlu dilihat relasinya dengan fenomena yang berkembang pada saat itu. Grebstein (1968: 161—169) dengan teori sosio-kulturalnya mengatakan bahwa dalam rangka memahami karya sastra, karya tersebut tidak dapat dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan, atau peradaban yang telah menghasilkannya. Karya sastra harus dipahami dalam konteks yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada karya itu sendiri karena setiap karya sastra pada dasarnya adalah hasil pengaruh timbal balik yang rumit antara faktor-faktor sosial.

## 2. Pembahasan

Jejak praktik militerisme dapat ditelusuri melalui bentuk-bentuknya, seperti kekerasan dan penyeragaman. Kekerasan mencakupi berbagai aksi, seperti pemukulan, penyiksaan, penculikan, dan penghilangan orang. Praktik militerisme itu juga dapat dilihat dari adanya usaha untuk menyeragamkan segala hal, khususnya dalam pandangan dan pola berpikir.

### 2.1 Kekerasan

Kekerasan adalah perihai (yang bersifat, berciri) keras, yakni perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau

pemaksaan (KBBI, 1994: 485). Cara-cara kekerasan telah menjadi bagian penting rezim Orde Baru dalam upaya “menertibkan” dan “mendisiplinkan” orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Berbagai penyelesaian masalah yang terjadi antara rakyat dengan negara hampir selalu berakhir dengan kekerasan dan tetesan darah. Aparat militer dan kepolisian yang menguasai alat-alat pembunuh dan berbagai jenis persenjataan tidak segan-segan menggunakannya untuk menghadapi rakyatnya sendiri, seperti kasus Kedung Ombo, Aceh, Sampang, Tri Sakti, dan Semanggi. Meskipun militer dan militerisme tidak sama, tetapi dalam puisi-puisi mereka dapat dilihat militerisme yang dilakukan oleh aparat militer. Praktik militerisme dalam wujud kekerasan fisik secara sederhana dapat dilihat melalui kehadiran tentara dan polisi dengan segala atribut dan peralatan militernya, seperti senapan, tank, peluru, sepatu, dan baju seragam. Jenis-jenis persenjataan militer itu hadir dalam puisi lengkap dengan “desingan” dan “letusan” “bunyi” peluru sehingga puisi-puisi itu juga “mengandung tetesan darah”. Sajak Rendra yang berjudul “Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon” dan sajak “Atmajaya—Semanggi” karya Eka Budianta berikut ini merefleksikan praktik militerisme dengan menghadirkan potret kekerasan dan keberadaan tentara dalam menghadapi demonstrasi.

....  
Aku berdiri di muka kantor polisi  
Aku melihat wajah berdarah seorang  
demonstran  
Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang  
dan sebatang jalan panjang  
penuh debu  
penuh kucing-kucing liar  
penuh anak-anak berkudis  
penuh serdadu-serdadu yang jelek dan  
menakutkan  
....

(1993: 99)

Kampus yang terberkati  
Sejarah mencatat air matamu  
Lautan doa umat sejagat  
Bermuara ke kampus pembantaian ini  
Ketika peluru berdesing, gugur bunga

Jembatan Semanggi yang terluka  
Dunia berkabung untukmu  
Ceceran darah Indonesia  
Di aspal jalan Sudirman  
Korban anak manusia  
(2000:8)

Dalam menghadapi perlawanan rakyat yang menolak pembangunan dam di Kedung Ombo, aparat menggunakan pola penyiksaan, intimidasi, teror, cap PKI, pemaksaan cap jempol persetujuan ganti rugi, tamparan, jambakan, pukulan, tendangan, ancaman akan di “petrus”kan, dan penggenangan secara paksa areal pemukiman (Prasetyo, 2001: 137). Sebagian kecil jejak praktik militerisme itu terefleksikan dalam sajak “Ceritakanlah ini Kepada Siapa pun”: “/...//waktu juga yang menyingkap/retorika penguasa /walau /senjata ditodongkan kepadamu/walau sepatu di atas kepalamu/di atas kepalaku/di atas kepala kita/” (2000: 16).

Kekerasan fisik yang sering digunakan oleh penguasa adalah penculikan dan penyiksaan. Untuk membungkam para aktivis atau orang-orang yang dianggap “berbahaya”, penguasa melalui tangan-tangan militer, tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, penculikan, bahkan penghilangan orang. Selama Rezim Orde Baru berkuasa ada tiga kasus penghilangan orang secara paksa yang menonjol, yaitu (1) korban penculikan aktivis tahun 1998, (2) penculikan petani dan buruh, dan (3) penculikan di Aceh dan Irian Jaya. Penghilangan orang terjadi di berbagai tempat dari Aceh sampai Jayapura. Tahun 1981—1990 sebanyak 490 orang di Kediri, Malang, dan

Jayapura. Tahun 1981—1990 sebanyak 490 orang di Kediri, Malang, dan Tanjung Priok hilang. Ratusan orang hilang di Aceh selama diterapkannya DOM, terbanyak adalah aktivis yang hilang sebagai akibat peristiwa 27 Juli (*Kompas*, 31 Agustus 2001). Sajak yang berjudul "Ibunda" (2000: 137) karya Thukul merefleksikan kekerasan berupa penyiksaan dan pemenjaraan tanpa prosedur yang benar dan proses pengadilan: "Ibunda/akhirnya menjengukku juga/datang ke penjara/dari kampung ke ibukota/melihat anak tersayang/babak belur/dianiaya tentara/.../kejahatan macam apakah/yang dijalani oleh anakku/hingga kalian main strom seenaknya/sampai anakku demam/tinggi suhu panas badannya". Cap berbahaya yang dilemparkan pada seseorang juga bersifat sepihak atau menurut versi penguasa. Dalam kasus penculikan para aktivis PRD terkait peristiwa Sabtu kelabu, 27 Juli 1996 aparat menggunakan pola penyiksaan berupa pemukulan, penyetruman, kawat yang diikat di kaki untuk menjepit bak air, penggrebekan kantor, intimidasi, pemukulan, tendangan, sulutan dengan rokok, tusukan dengan pistol, dan penelanjangan. Bentuk-bentuk penyiksaan, seperti pemukulan, penyetruman, tendangan, dan tamparan dilakukan diluar prosedur hukum yang berlaku juga tampak dalam sajak "Untuk Pius Lustrilanang" (2000: 6) karya Eka Budianta berikut ini.

Ketika kekejaman memihak penguasa  
Rakyat diculik, dibunuh sesuka negara  
Ketika tentara jadi alat penyiksaan  
Kamu disekap, dibentur-benturkan  
Dianiaya seperti Kristus temanmu

Atas nama bangsa dan negara  
Aceh dibantai, Timor Leste dibantai  
Papua dibantai, Marsinah dibantai  
....

Gambaran tentang pemenjaraan dan penggunaan kekerasan bersenjata untuk menopang kekuasaan yang dilakukan oleh aparat juga tampak dalam sajak yang berjudul "Merontokkan Pidato". Dalam sajak ini, tidak hanya terungkap pemenjaraan seseorang dalam tahanan yang tidak layak, seperti yang dialami para aktivis PRD, yang disekap di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap gulita tanpa melalui proses pengadilan, tetapi juga terlihat pada perilaku penguasa yang menggunakan peralatan militer dan kekerasan sebagai pembenar dan pemaksa rakyat untuk selalu tunduk pada keputusan yang dibuatnya, "berminggu-minggu ratusan jam/aku dipaksa/akrab dengan sudut-sudut kamar/lobang-lobang udara/lalat semut dan kecoa/.../kukibas-kibaskan pidatomu itu/dalam kepalaku hingga rontok/maka terang benderanglah/ucapan penguasa selalu dibenarkan/laras senapan!" (2000: 153)

Penyiksaan aparat terhadap para aktivis atau orang-orang yang dianggap melawan penguasa seringkali dilakukan di luar batas-batas perikemanusiaan. Penyiksaan itu dapat berdampak pada dua hal, yaitu membuat orang yang disiksa merasa ketakutan dan trauma selama hidupnya atau justru semakin tegar dan kuat dalam melakukan perlawanan. Tubuh yang babak belur dan darah yang menetes menjadi energi yang kuat untuk mengentalkan semangat perlawanan. Sebagai aktivis gerakan rakyat yang selalu terlibat dengan berbagai aksi masa, bentuk-bentuk penyiksaan sudah menjadi bagian hidup Thukul. Ia sendiri pernah hampir buta matanya karena dipukul dengan senjata di sudut kiri matanya dalam aksi protesnya bersama warga kampung di Solo. Sebagai penduduk Jagalan Pucangsawit, ia bergabung dengan masyarakat sekampungnya untuk memprotes pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tekstil PT Sari Warna Asli. Tahun 1995, ia memimi-



kehilangan mata kirinya karena dipopor oleh tentara. Penyiksaan yang melampaui batas-batas peri kemanusiaan itu terungkap dalam sajak "Derita Sudah Naik Seleher", /darah sudah kauteteskan/dari bibirku/luka sudah kaubilurkan/ke sekujur tubuhku/cahaya sudah kaurampas/dari biji mataku/derita sudah naik seleher/kau /menindas/sampai/di luar batas/(2000: 139)

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer dan kepolisian juga tidak jarang membuat seseorang menderita cacat fisik. Sajak "Tetangga Sebelahku" merefleksikan penderitaan seorang warga akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan senjata. Penggunaan senjata untuk melukai seseorang tidak saja menyebabkan kerusakan atau cacat fisik, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Orang yang telah mengalami kekerasan itu selalu merasa tidak aman atau terancam jiwanya, meskipun berada di rumahnya sendiri. Teror dan penciptaan situasi ketakutan merupakan strategi untuk menekan protes-protes dan gerakan rakyat. Cara-cara kekerasan yang selalu ditunjukkan oleh penguasa telah menjadi teror yang menghantui hidup masyarakat: /.../kuping sebelahnya rusak/dipopor senapan/tetangga sebelahku/hidup bagai dalam benteng/melongok-longok selalu /membaca bahaya/tetangga sebelahku /diteror masa lalu/(2000: 17)

Militer, yang seharusnya menjalankan tugas-tugas pengamanan, beralih menjadi mesin penindas gerakan rakyat yang berusaha menjalankan kontrol pada negara (Prasetyo, 2001: 171). Bahkan, dalam berbagai kasus terlihat tentara secara sistematis melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang dianggap musuh negara (Prasetyo, 2001: 135). Penggunaan persenjataan militer untuk menakuti atau meneror rakyat seringkali berlebihan. "Sajak Suara" merefleksikan cara

penguasa menghadapi kritik dari masyarakat. Suara kritis, yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa dihadapi oleh aparat keamanan dengan senjata yang siap untuk ditembakkan: /sesungguhnya suara itu bukan perampok/yang ingin merayah hartamu/ia ingin bicara/mengapa kau kokang senjata/dan gemetar ketika suara-suara itu/menuntut keadilan? (2000: 58).

Ketakutan penguasa terhadap sikap kritis dan perlawanan rakyat semakin mengentalkan sikap represif penguasa yang tidak segan-segan menghadapinya seperti menghadapi seekor tikus yang harus dimusnahkan. Wajah kekuasaan yang ditunjukkan rezim Orde Baru adalah wajah kejam dan bengis. Dalam sajak "Tikus", wajah bengis kekuasaan digambarkan lebih menakutkan daripada harimau. Penguasa tidak menghargai harkat dan martabat manusia sehingga memperlakukan manusia seperti binatang yang dapat dilindas, diburu, digebuk, dan ditembak. Sepanjang rezim Orde Baru berkuasa tidak terhitung banyaknya pelanggaran HAM dalam bentuk penafikan terhadap harkat kemanusiaan seseorang yang berani berseberangan dengan penguasa. Melalui tangan-tangan jaksa, penguasa juga tidak segan-segan menyeret seseorang dan mendudukkannya sebagai terdakwa hanya karena masuk dalam sebuah organisasi atau memunyai pendapat yang berbeda dengan penguasa. Wajah kekuasaan menjadi sangat mengerikan. /siapa suka harkat manusia/senilai tikus/diburu/digebuk/ditembak/seperti tikus/.../didudukan/di kursi terdakwa/dituding tuan jaksa/ingin menggulingkan negara/hanya karena berorganisasi/dan punya lain pendapat/(2000: 131)

Ancaman kekerasan fisik dan teror menjadi cara yang selalu ditempuh penguasa untuk mengontrol dan mendisiplinkan rakyat. Orang-orang yang berani bersuara kritis diancam dengan

undang-undang karet, yakni undang-undang subversif yang sangat mudah ditarik ulur atau ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan dan kehendak penguasa. Sebagaimana dalam sajak "Rumput Ilalang", dalam sajak yang berjudul "Harimau" terungkap cara-cara kekerasan, intimidasi, teror, dan ancaman pada orang-orang yang bersuara kritis. Dalam sajak "Harimau", Thukul menggunakan diksi "tertawa" untuk merepresentasikan suara kritis atau vokal yang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Larangan "tertawa" disertai ancaman yang menakutkan.

Pancasila sebagai dasar negara dijadikan tameng kekuasaan dengan memberikan tafsir sesuai dengan kebutuhan. Pancasila harus menjadi azas tunggal atau satu-satunya azas yang boleh dipakai dalam suatu organisasi. Untuk menegakkan Pancasila sebagai dasar Negara dan untuk mengawal pembangunan sebagai proses mencapai tujuan, pemerintah menggunakan senjata sebagai penopangnya. Gambaran bagaimana Pancasila ditegakkan dapat dilihat pada sajak "Sajak Dor Dor Hure Dua" karya Mustofa Bisri berikut ini.

Dor!  
 Hidup Ketuhanan Yang Maha Esa!  
 Dor! Dor!  
 Hidup Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!  
 Dor! Dor! Dor!  
 Hidup Persatuan Indonesia!  
 Dor! Dor! Dor! Dor!  
 Hidup Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  
 Kebijaksanaan dalam  
 permusyawaratan/perwakilan!  
 Dor! Dor! Dor! Dor!  
 Hidup keadilan sosial bagi seluruh rakyat  
 Indonesia!  
 Dor!  
 Dor!  
 Dor Pancasila !  
 Dor ! Dor !

Teror untuk menakuti dan mematahkan semangat orang-orang yang dianggap vokal dan membahayakan negara dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan pemberian cap PKI, anti-Pancasila, fundamentalis, atau subversif, tetapi juga penggeledahan dan ancaman keluarga, seperti yang pernah dialami Thukul. Tanpa dibekali surat izin sesuai prosedur, aparat melakukan penggeledahan di rumahnya. Pada tanggal 5 April 1996, delapan polisi berpakaian preman bergerak ke kampung Kalangan untuk menggerebeg rumah Thukul. Di rumah kecil sederhana berlantai tanah yang berdiri di pinggir sungai itu, polisi tidak menemukan Thukul. Polisi membawa buku-buku kumpulan puisi, antara lain karya Thukul yang berjudul *Mencari Tanah Lapang*, buku-buku lain, poster, dan surat-surat yang dibuat Thukul selaku ketua JAKKER serta sejumlah stiker. Penggeledahan itu membuat anak-anak Thukul ketakutan dan mengalami trauma sehingga selalu ketakutan setiap kali melihat orang bertampang polisi atau militer (Kedaulatan Rakyat, 1996). Peristiwa itu terefleksikan dalam sajaknya yang berjudul "(Tanpa Judul)". Secara tidak langsung, cara-cara seperti itu dianggap sebagai pendidikan kekerasan terhadap anak-anak selaku generasi muda yang tidak seharusnya mendapatkan pendidikan kekerasan dan penindasan.

kuterima kabar dari kampung  
 rumahku kalian geledah  
 buku-bukuku kalianjarah

tapi aku ucapkan banyak terima kasih  
 karena kalian telah memperkenalkan  
 sendiri  
 pada anak-anakku  
 kalian telah mengajar anak-anakku  
 membentuk makna kata penindasan  
 sejak dini

ini tak diajarkan di sekolahan

tapi rejim sekarang ini memperkenalkan kepada semua kita setiap hari di mana-mana sambil nenteng-nenteng senapan (2000: 140)

## 2.2 Penyeragaman

Penyeragaman merupakan wujud militerisme yang lebih mengarah pada sasaran nonfisik, seperti pendapat dan pikiran. Militer sangat hierarkis, bawahan harus selalu tunduk pada atasan sehingga tidak ada ruang dialog. Budaya militerisme seperti itu tidak "menyediakan" penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Orang yang berbeda pendapat dengan penguasa akan dianggap sebagai musuh. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang dianggap baik adalah yang menuruti segala perintah dan keinginan penguasa. Untuk tidak ditempatkan sebagai target yang harus dihilangkan, seseorang harus sependapat dengan penguasa. Upaya penyeragaman itu terlihat dalam sajak yang berjudul "Buron". Sajak yang merefleksikan pengalaman Thukul ketika hidup sebagai buron setelah meletus peristiwa 27 Juli itu, merepresentasikan perilaku penguasa dengan tangan-tangan perpanjangannya yang selalu siaga dan siap memenjarakan orang-orang yang berani berpikiran berbeda dengannya. Dalam upaya penyeragaman itu pula, penguasa memanfaatkan pasal karet bernama undang-undang subversif: /baju lain/celana lain/potongan rambut lain/buku yang dibaca lain/nama lain/ekspresi lain/menjadi/diri/sendiri/adalah tindakan /subversi/di negeri ini/maka/selalu siaga/polisi/tentara/hukum dan penjara/bagi siapa saja/yang menolak/menjadi/orang lain/ (2000: 142).

Pemasangan terhadap kebebasan berpikir, bersuara, bertindak, dan berorganisasi juga merupakan bentuk praktik militerisme. Masyarakat tidak diperbolehkan bersuara vokal dan memiliki

pendapat yang berbeda dengan penguasa. Siapa pun yang berani bersuara berbeda dianggap sebagai musuh negara dan akan diancam dengan undang-undang subversif dengan tuduhan hendak menggulingkan negara yang sah, seperti tampak pada sajak "Harimau": /.../diancam dengan undang-undang subversi/dan hukuman mati/.../bahwa tertawa terbahak-bahak/itu liberal/bertentangan dengan budaya nasional/dan merongrong stabilitas negara/karena itu/orang yang berbicara/tertawa /berpendapat/dan berserikat/harus mencantumkan apa azasnya/kalau nekat/tembak di tempat/.../(2000: 156—157).

Dalam sajak "Sajak Mata-mata", Rendra juga menggambarkan upaya penyeragaman yang dilakukan oleh penguasa dengan cara memilahkan atau mengatur informasi yang masuk ke masyarakat, yaitu melalui kaca mata penguasa. Rakyat hanya dapat menerima apa yang diberikan oleh penguasa dan tidak boleh memilih atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya.

Betapa kita tak tahu,  
koran-koran ditekan sensor,  
dan mimbar-mimbar yang bebas telah dikontrol  
Koran-koran adalah penerusan mata kita  
Kini sudah diganti mata yang resmi  
Kita tidak lagi melihat kenyataan yang beragam  
Kita hanya diberi gambaran model keadaan yang sudah dijahit oleh penjahit resmi  
.....  
(1993: 76)

Upaya penyeragaman di wilayah pemberitaan media tampak dalam sajak "Aku Berkelana di Udara": /di udara seribu suara berbicara/kalian tak bisa menyeragamkannya/ketika meletus peluru laras senapan/gemanya menyebar ke sudut-sudut benua/. Sajak tersebut mengungkapkan adanya usaha menyeragamkan pers, khususnya pers elektronik, agar

menyiarkan berita dari sudut pandang penguasa. Penguasa merasa takut jika praktik militerisme yang dilakukannya dan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, diketahui dunia internasional.

### 3. Simpulan

Praktik militerisme yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru ternyata tidak membuat semua penyair memilih lari ke wilayah simbol supaya karyanya "aman" di surat kabar dan majalah yang tumbuh

di bawah ancaman pembredelan dan pencabutan SIUP. Praktik militerisme dengan segala akibatnya merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat dan dilihat oleh penyair sebagai persoalan kehidupan sebagaimana masalah-masalah kehidupan lainnya yang menjadi perhatian sastrawan pada umumnya. Oleh karena itu, masalah militerisme akan tetap muncul di dalam karya sastra. Apalagi, budaya dan praktik militerisme itu masih ada hingga kini meskipun kekuasaan politik Orde Baru sudah berakhir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budianta, Eka. 2000. *Masih Bersama Langit*. Magelang: Indonesia Tera.
- Bisri, K.H. A. Mustofa. 1991. *Ohoi: Kumpulan Puisi-puisi Balsem*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Grebstein, Sheldon Norman. 1968. *Perspectives in Contemporary Criticism*. New York: Harper Row.
- Heryanto, Ariel. 2000. "Militerisme" dalam *Perlawanan dalam Kepatuhan: Esai-esai Budaya Ariel Heryanto*. Idi Subandi Ibrahim (ed.). Bandung: Mizan
- \_\_\_\_\_. 2000. "Militerisme, Sisi Kejiwaan, dan Perilakunya" dalam *Perlawanan dalam Kepatuhan: Esai-esai Budaya Ariel Heryanto*. Idi Subandi Ibrahim (ed.). Bandung: Mizan
- Kompas*. 2001. "Negara Harus Bertanggung Jawa Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa". Tanggal 31 Agustus.
- Kedaulatan Rakyat*. 1996. "Di Solo 24 Aktivis PRD Terus Diburu". Tanggal 9 Agustus, hlm. 1.
- Prasetyo, Eko. 2001. *HAM: Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Relajar.
- Pusat Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yakarta: Balai Pustaka
- Rendra, WS. 1993. *Potret Pembangunan dalam Puisi*. Jakarta: PT Anem Kosong Anem.



Sulasmono, Bambang Suteng. 1996. "Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Bidang Politik" dalam Yohanes Mardimin (ed). *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius

Thukul, Wiji. 2000. *Aku Ingin Jadi Peluru*. Magelang: Teraindonesia